

## INTISARI

Implementasi *E-Procurement* di Indonesia di mulai pada tahun 2008 dengan payung hukum Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Dari tahun ke tahun penggunaan sistem *E-Procurement* semakin meningkat. Pada tahun 2017 LPSE yang menyelenggarakan *E-Procurement* berjumlah 635 yang awalnya hanya berjumlah 11 LPSE saja pada tahun 2008, kemudian tahun 2017 sebanyak 34 propinsi sudah melaksanakan *E-Procurement*, selanjutnya untuk instansi yang menyelenggarakan *E-Procurement* tahun 2017 mencapai 731 instansi di seluruh Indonesia, realisasi lelang dengan sistem *E-Tendering* tahun 2017 berjumlah 123.542 paket lelang. *E-Procurement* diciptakan dalam rangka meningkatkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta menciptakan prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam perjalanannya, *E-Procurement* mengalami banyak hambatan yang bisa berakibat terganggunya proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis hambatan yang ada dalam proses *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud serta solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis-jenis hambatan dalam proses *E-Procurement* didapatkan dari informasi lapangan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif untuk menjelaskan jenis-jenis hambatan dalam proses *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud. Teknik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara terhadap informan yang ada di LPSE Kemendikbud dan dokumentasi terhadap arsip serta dokumen yang berkaitan dengan proses *E-Procurement* yang ada di LPSE Kemendikbud. Teknik analisa data diawali dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data yang sudah terkumpul dan bagian akhir adalah mengambil kesimpulan dan saran penelitian.

Proses pelaksanaan *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud dilakukan dengan cara E-Tendering yang mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Hasil penelitian menemukan jenis-jenis hambatan dalam proses *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud, hambatan tersebut terkait dengan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Struktur organisasi LPSE Kemendikbud masih berbentuk tim bukan merupakan unit kerja mandiri yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari sisi SDM, sifat pekerjaan pegawai LPSE Kemendikbud bersifat tugas tambahan dan bukan merupakan tugas pokok jabatan serta belum adanya program pelatihan pegawai yang dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi pegawai dibidang teknologi informasi. Dari sisi infrastruktur belum ada pemeliharaan infrastruktur yang dilakukan secara rutin untuk menjaga infrastruktur tersebut selalu dalam kondisi baik guna mendukung proses *E-Procurement* di LPSE Kemendikbud.

Kata Kunci: E-Procurement, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## ABSTRACT

The implementation of *E-Procurement* in Indonesia started in 2008 with the legal support of Presidential Decree No. 80 of 2003. The usage of *E-Procurement* system increases every year. In 2017, 63 LPSE implemented *E-Procurement* compared with only 11 LPSE in 2008, and in 2017, 34 provinces and 731 agencies across Indonesia implemented *E-Procurement*. The realizations of auction by *E-Tendering* system in 2017 were 123.542 auction packages. *E-Procurement* was create to improve openness, transparency, and accountability, as well as to create healthy competition in procurement of goods/services. In its development, *E-Procurement* experiences many obstacles which may disturb government goods/service procurement. This study aimed to analyze the types of obstacles in the *E-Procurement* process in the LPSE of the Ministry of Education and Culture and the solutions for them. The types of obstacles in *E-Procurement* process were obtained from field information from parties directly involved in *E-Procurement* in the LPSE of the Ministry of Education and Culture.

This study used qualitative method which produces descriptive data to describe the types of obstacles in the *E-Procurement* process in the LPSE of the Ministry of Education and Culture. The data collection techniques were interview with informants in the LPSE of the Ministry of Education and Culture and documentation of archives and documents related with *E-Procurement* process in the LPSE of the Ministry of Education and Culture. The data analysis technique started with data collection, followed by reduction of collected data, and ended with drawing conclusion and making research suggestions.

The implementation of *E-Procurement* in the LPSE of the Ministry of Education and Culture was performed by E-Tendering which refers to the Regulation of the Head of LKPP No. 1 of 2015 on E-Tendering. The research found that the types of obstacles in the *E-Procurement* process in the LPSE of the Ministry of Education and Culture were related to organizational structure, human resources and infrastructure. The organization structure of the LPSE of the Ministry of Education and Culture was team, not independent work unit in of the Ministry of Education and Culture. In terms of human resources, the jobs of the employees of the LPSE of the Ministry of Education and Culture were additional tasks, not official main tasks, and there was no routine employee training program to improve the employees' competency in information technology. In terms of infrastructure, there was no routine infrastructure maintenance to ensure that it's in a good condition to support *E-Procurement* process in the LPSE of the Ministry of Education and Culture.

**Keywords:** E-Procurement, Procurement of Government Goods/Service